

DEMOKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Setelah hampir setengah abad merdeka, bicara tentang demokrasi di negeri kita ibarat mengunjungi sebuah rumah antik. Misalnya, rumah Thomas Jefferson, orang yang mengaku segan beragama tapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yang Mahaesa dan nilai-nilai universal (*deist, unitarianist universalist*). Kita mungkin dapat memahami desain, tata ruang, dan susunan perabotannya, tapi belum tentu dapat dengan tepat punya gambaran bagaimana penghuninya dulu hidup. Dan “demokrasi” memang barang antik.

Amerika menegaskan keantikannya dengan menghidupkan kembali gedung Capitol Yunani kuna untuk semua gedung perwakilannya, di pusat dan di negara-negara bagian. Tapi di Yunani sendiri sudah sejak ribuan tahun yang lalu demokrasi dilupakan orang. Dan setelah sistem Eropa Timur kini hancur berantakan, “demokrasi” semakin menjadi cap dagang utama bangsa-bangsa Nordik atau Anglo Sakson. Hanya mereka yang saat ini mengaku benar-benar demokratis. Barangkali terkecuali sedikit bangsa bukan Anglo Sakson, seperti Prancis, Itali, dan Jepang.

Demokrasi antik di Indonesia bukan ide dasarnya, melainkan kontroversinya. Dalam sejarah sekitar proklamasi, kita dapati masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan sengit antara para pendiri republik. Kita merasa kenal dengan jargon-jargon mereka: “dewan”, “perwakilan”, “rakyat”, “majelis”, “musyawarah”, “mufakat”, dan seterusnya. Juga ada pinjaman yang lebih kontemporer: “delegation of authority”, “*decision by representation*”, “*rule of law*”, “*majority rule*”

and minority right”, dan entah apa lagi. Kita merasa kenal semuanya. Tapi rasanya tidak mungkin kita mengakui benar-benar mengerti maksudnya, apalagi menggambarkan dengan tepat bagaimana masing-masing yang mengklaim demokrasi itu bertingkah laku. Malah, konon, ada di antara mereka yang begitu bersemangat mengumandangkan demokrasi, namun dalam hidup nyata sehari-harinya sendiri, dia tidak melaksanakannya. Meskipun banyak buku yang dibaca dan berbagai istilah dan fraseologi demokrasi yang dihafal, di rumahnya atau, lebih mungkin lagi, di kantornya, dia adalah seorang diktator dalam sistem Soviet supermini (misalnya, dengan terus-menerus mengibuli “rakyat”-Nya dan membiarkan mereka putus informasi). Bagaimana mungkin dia menjadi seorang demokrat sejati. Dia mudah sekali tersinggung! *“He easily got mad at the slightest difference of opinion”*, seorang teman asing mencoba mendukung. “Jangan-jangan dia dulu bicara tentang demokrasi tidak karena benar-benar menghayatinya tapi karena itulah komoditi politik yang paling laku,” komentar teman asing yang lain.

Memang masalahnya selalu menarik. Lihat saja kasus Bung Karno. Dengan kemampuan retoriknya yang hebat itu, dia adalah juga membela demokrasi yang bersemangat. Namun, sungguh ironis, dia jatuh karena tuduhan sebagai seorang diktator yang membiarkan terjadinya kultus individu terhadap dirinya.

Dan karena punya pandangan sendiri tentang apa itu demokrasi, dia acapkali menuding para pengklaim demokrasi yang lain sebagai tidak lebih daripada kaki tangan “Nekolim”. Para pemimpin Masyumi, misalnya, sangat menderita oleh tuduhan semacam itu. Bahwa mereka kaki tangan “Nekolim”, terasa sungguh mustahil, mengingat peran positif mereka yang cukup besar dalam ikut meletakkan batu pertama fondasi kemerdekaan kita. Tetapi memang para pemimpin Masyumi saat itu, bersama dengan mereka dari PSI, Parkindo, dan Partai Katholik, adalah tokoh-tokoh yang banyak menggunakan jargon-jargon politik modern (Barat). Ini tentu menjadi hak mereka, dan dapat dibenarkan, karena mereka termasuk barisan pertama warga Indonesia yang berpendidikan

modern (Belanda) dan merupakan “*The Indonesian first rate intellectuals*”. Para peninjau asing pun banyak yang menilai mereka sebagai pendukung demokrasi Barat.

Karena itu, dapat dimengerti jika mereka kecewa sekali bahwa sikap terhadap Bung Karno, yang mereka anggap kemudian terbukti benar, tidak menghasilkan imbalan apa-apa di awal Orde Baru. Lebih pahit lagi mengenang pengalaman, bagaimana usaha mereka membendung Bung Karno dan PKI lewat pembentukan Liga Demokrasi gagal hanya karena kesalahpahaman, atau ketidakpahaman, atau perbedaan kepentingan (*vested interest*) dari kelompok yang mereka harapkan akan mendukung tapi ternyata, kata mereka, menghalangi.

Tapi para “penghayat demokrasi” barangkali masih harus mempelajari pandangan teoretis yang lebih “absah” tentang kekuasaan politik di kalangan rakyat. Seperti menjadi sasaran kritik pedas para sarjana Syi’ah (Hamid Inayat, misalnya), teori politik kaum Sunnah (jadi, tentunya menyangkut sebagian besar rakyat kita) sangat berat berorientasi kepada keamanan dan kestabilan, sehingga menjadi konservatif dan anti perubahan, sebab suatu perubahan dapat membawa kekacauan (*fawdlā*). Maka, Kiai Shalih dari Semarang, misalnya, dalam sebuah kitabnya yang berbahasa Jawa dan bertuliskan Arab Pegon, menegaskan perlunya orang Islam berpegang pada pandangan Politik Sunni klasik bahwa pemberontakan kepada kekuasaan yang sah, biar pun zalim, adalah terlarang menurut agama, meskipun tetap wajib melakukan amar makruf nahi munkar. “Enam puluh tahun di bawah pernerintahan yang zalim (tapi efektif) lebih baik daripada sehari tanpa pemerintahan (yang mengakibatkan kekacauan)”, dia menegaskan, yang konon dari sebuah hadis.

Atau lihat Ibn Taimiyah yang katanya, panutan kaum “modernis” itu, dia berkata, “Tuhan mendukung kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang zalim meskipun Islam!” Dia juga berkata, “Dunia akan tetap bertahan dengan keadilan sekalipun kafir, dan tidak akan bertahan dengan kezaliman sekalipun

Islam!” Ini karena, baginya, *ideatum* Islam tentang kekuasaan dan negara ialah keadilan. Barangkali sejiwa dengan dalil itu, maka Amerika yang Protestan pernah punya Presiden Katholik, JF Kennedy. Atau India yang Hindu pernah punya Presiden yang Muslim, Zahir Hussein (tapi presiden di sana hanya lambang). Atau Filipina yang Katholik, punya presiden Protestan, Fidel Ramos.

Demokrasi memang tak terelakkan, tapi penuh persoalan. Karena itu, harus selalu sempat dibicarakan. Hanya saja, barangkali, sebaiknya jangan terlalu gaduh, karena bisa dianggap sebagai lelucon atau guyonan. Apalagi jika kita sendiri, para penganjurnya, tidak mampu memberi teladan. Apakah kita menganjurkan orang lain berbuat kebaikan, tapi diri sendiri terlupakan? Padahal kita tahu perkaranya lewat bahan bacaan. Begitulah peringatan al-Qur'an. [❖]